

MRT RAMPUNG 2017

JAKARTA (Pos Kota) – Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tahap I rute Lebak Bulus-Bunderan Hotel Indonesia (HI) secara resmi dimulai, Kamis (2/5). Pengerjaan proyek bernilai Rp16 triliun ini akan didahului jalur bawah tanah. MRT diprediksi rampung tahun 2017.

Peliput: Guruh

Gubernur Jokowi mengatakan pembangunan dimulai untuk paket bawah tanah, karena membutuhkan waktu lama. "Di titik ini akan ada stasiun. Sekarang (kemarin-red), resmi dimulai," katanya setelah peresmian peluncuran pembangunan MRT, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Pengerjaan paket bawah tanah dimenangkan dua konsorsium dari Jepang dan BUMN yakni Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture. Mereka mengerjakan dua paket.

Sementara itu, Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation dipilih untuk satu paket. Pembangunan ketiga paket underground menghabiskan dana sebesar Rp3,6 triliun.

Jokowi meminta kedua pemenang tender agar bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni pada 2017 mendatang. Keberadaan angkutan massal berbasis rel ini

sudah ditunggu warga Jakarta.

Meminimalisir kemacetan saat pembangunan, pihaknya meminta agar kontraktor berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. "Semua sudah dirancang, termasuk manajemen lalu lintas," ucapnya.

KONTRAK KERJA
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami,

“**Pembangunan didahului jalur bawah tanah**”

mengatakan segera menyelesaikan kontrak kerja dengan pemenang tender. Kemudian kontraktor akan merampungkan design engineering detail (DED).

Ia juga berjanji segera mencairkan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah masuk dalam APBN. "Tidak



Gubernur Jokowi didampingi Dirut MRT Jakarta, Dono Bustami, menunjukkan denah pembangunan MRT pada acara peresmian pembangunan MRT di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/5). Foto: Iga

akan lewat tahun ini konstruksi akan dimulai. Tidak ada alasan lagi untuk ditunda," ujarnya.

Proses pembangunan MRT tergolong alot. Sebelumnya, tarik ulur sempat terjadi setelah Jokowi meminta negosiasi ulang terhadap tanggung jawab be-

ban utang antara yang harus dibayarkan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat kepada JICA.

Dengan prosentase 52 persen menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dan 48 untuk pemerintah pusat, Jokowi keberatan. Kelanjutan pamban-

gunaan MRT baru dipastikan setelah melalui lobi panjang dengan Kementerian Keuangan yang akhirnya mengubah beban tanggung jawab beban utang menjadi 51 persen untuk Pemprov DKI Jakarta dan 49 ditanggung pemerintah pusat. (st/o)